



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN KULON PROGO  
 dan  
 BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.799.639.982.159,00 berkurang sejumlah Rp62.714.577.214,45 sehingga menjadi Rp1.736.925.404.944,55 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan			
1. Semula	Rp	1.770.881.996.105,00	
2. Berkurang	Rp	129.212.000.845,77	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp	1.641.669.995.259,23

b. Belanja			
1. Semula	Rp	1.766.777.593.422,00	
2. Berkurang	Rp	63.831.349.706,45	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 1.702.946.243.715,55
Defisit setelah perubahan			Rp (65.380.651.139,32)
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp	28.757.986.054,00	
b) Bertambah	Rp	66.497.423.631,32	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp 95.255.409.685,32
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp	32.862.388.737,00	
b) Bertambah	Rp	1.116.772.492,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp 33.979.161.229,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan			Rp 65.380.651.139,32
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp 0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah			
1. Semula	Rp	247.920.163.365,00	
2. Berkurang	Rp	30.366.324.217,88	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp 217.553.839.147,12
b. Dana Perimbangan			
1. Semula	Rp	1.062.723.464.250,00	
2. Berkurang	Rp	114.438.944.923,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan			Rp 948.284.519.327,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1. Semula	Rp	460.238.368.490,00	
2. Berkurang	Rp	15.593.268.295,11	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan			Rp 475.831.636.785,11

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah			
1. Semula	Rp	75.488.926.650,00	
2. Berkurang	Rp	10.985.696.100,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan			Rp 64.503.230.550,00

b. Hasil Retribusi Daerah			
1. Semula	Rp	10.576.578.085,00	
2. Berkurang	Rp	3.408.433.315,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan			Rp 7.168.144.770,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1. Semula	Rp	15.719.773.050,00	
2. Berkurang	Rp	2.964.811.852,78	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan			Rp 12.754.961.197,22
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1. Semula	Rp	146.134.885.580,00	
2. Berkurang	Rp	13.007.382.950,10	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan			Rp 133.127.502.629,90

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak			
1. Semula	Rp	19.225.276.250,00	
2. Bertambah	Rp	1.875.846.750,00	
Jumlah Dana Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan			Rp 21.101.123.000,00
b. Dana Alokasi Umum			
1. Semula	Rp	737.498.209.000,00	
2. Berkurang	Rp	74.163.199.000,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan			Rp 663.335.010.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1. Semula	Rp	305.999.979.000,00	
2. Berkurang	Rp	42.151.592.673,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan			Rp 263.848.386.327,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis:

a. Dana Hibah			
1. Semula	Rp	37.829.800.000,00	
2. Bertambah	Rp	10.874.500.000,00	
Jumlah Dana Hibah setelah perubahan			Rp 48.704.300.000,00

b. Dana Darurat				
1. Semula	Rp		0,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp		0,00	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan				Rp 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya				
1. Semula	Rp	85.839.593.815,00		
2. Berkurang	Rp	1.016.650.454,89		
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan				Rp 84.822.943.360,11
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
1. Semula	Rp	76.248.673.000,00		
2. Berkurang	Rp	8.178.900.000,00		
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan				Rp 68.069.773.000,00
e. Dana Desa				
1. Semula	Rp	94.492.017.000,00		
2. Berkurang	Rp	940.209.000,00		
Jumlah Dana Desa setelah perubahan				Rp 93.551.808.000,00
f. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya				
1. Semula	Rp	165.828.284.675,00		
2. Bertambah	Rp	14.854.527.750,00		
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan				Rp 180.682.812.425,00
g. Sumbangan Pihak Ketiga				
1. Semula	Rp		0,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp		0,00	
Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga setelah perubahan				Rp 0,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung				
1. Semula	Rp	881.717.913.277,27		
2. Bertambah	Rp	67.975.076.340,89		
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan				Rp 949.692.989.618,16

b. Belanja Langsung			
1. Semula	Rp	885.059.680.144,73	
2. Berkurang	Rp	131.806.426.047,34	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan			Rp 753.253.254.097,39
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja Pegawai sejumlah			
1. Semula	Rp	651.074.566.529,27	
2. Berkurang	Rp	1.139.746.531,46	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp 649.934.819.997,81
b. Belanja bunga			
1. Semula	Rp	93.496.324,00	
2. Bertambah	Rp	74.215.000,00	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp 167.711.324,00
c. Belanja subsidi			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp 0,00
d. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp	27.784.220.000,00	
2. Bertambah	Rp	4.446.950.000,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp 32.231.170.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp	20.040.000.000,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp 20.040.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1. Semula	Rp	8.606.551.000,00	
2. Berkurang	Rp	679.611.006,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan			Rp 7.926.939.994,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik			
1. Semula	Rp	169.978.490.974,00	
2. Berkurang	Rp	7.650.537.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan			Rp 162.327.953.974,00

## h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp	4.140.588.450,00	
2. Bertambah	Rp	72.923.805.878,35	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp 77.064.394.328,35

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

## a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp	34.789.649.625,00	
2. Bertambah	Rp	861.027.882,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp 35.650.677.507,00

## b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp	399.702.315.009,73	
2. Berkurang	Rp	22.945.059.014,34	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp 376.757.255.995,39

## c. Belanja Modal

1. Semula	Rp	450.567.715.510,00	
2. Berkurang	Rp	109.722.394.915,00	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			Rp 340.845.320.595,00

## Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

## a. Penerimaan

1. Semula	Rp	28.757.986.054,00	
2. Bertambah	Rp	66.497.423.631,32	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp 95.255.409.685,32

## b. Pengeluaran

1. Semula	Rp	32.862.388.737,00	
2. Bertambah	Rp	1.116.772.492,00	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp 33.979.161.229,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

## a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp	28.757.986.054,00	
2. Bertambah	Rp	66.497.423.631,32	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp 95.255.409.685,32



b. Pencairan Dana Cadangan				
1. Semula	Rp	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
1. Semula	Rp	0,00		
2. Bertambah/berkurang	Rp	0,00		
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah :				
1. Semula	Rp	0,00		
2. Berkurang/berkurang	Rp	0,00		
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :				
1. Semula	Rp	0,00		
2. Berkurang/berkurang	Rp	0,00		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan			Rp	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah :				
1. Semula	Rp	0,00		
2. Bertambah/berkurang	Rp	0,00		
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan			Rp	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:				
a. Pembentukan Dana Cadangan				
1. Semula	Rp	0,00		
2. Bertambah/berkurang	Rp	0,00		
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
1. Semula	Rp	31.411.020.072,00		
2. Bertambah	Rp	1.116.772.492,00		
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah perubahan			Rp	32.527.792.564,00
c. Pembayaran Pokok Utang				
1. Semula	Rp	1.451.368.665,00		
2. Bertambah/berkurang	Rp	0,00		
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan			Rp	1.451.368.665,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah			
1. Semula	Rp		0,00
2. Bertambah/berkurang	Rp		0,00
Jumlah pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah perubahan			Rp 0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
9. Lampiran IX Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

## Pasal 7

- (1) Dalam keadaan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat; dan/atau
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Belanja program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; atau
  - f. sosial.
- (4) Belanja keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang harus segera dilaksanakan; dan
  - b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan:
    1. mengganggu pelayanan masyarakat; dan
    2. mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah.
- (5) Mekanisme penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja untuk keperluan mendesak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 30 September 2020

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA ( 8, 36/2020)

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KULON PROGO,

